BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Pada jaman penjajahan Belanda Dinas Pekerjaan Umum bernama *Burgelijke Openbare Werken (BOW)* untuk Provinsi Jawa Barat disebut BOW Provinsi Jawa Barat, pada masa ini dibuat suatu daftar analisa bagi dasar perhitungan pekerjaan yang hingga kini masih berlaku dan dikenal dengan analisa BOW. Kemudian terjadi perubahan nama menjadi Departemen *V en W* atau Departemen *Verken en Waterstat*, untuk Provinsi Jawa Barat disebut *Provinciale Verken en Waterstat Van West Java.* Dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta, yang tergabung didalamnya *Jawatan Pengairan, PTT dan Jawatan Lalu Lintas Jalan Raya.* Pada masa Jepang menduduki Indonesia, maka Dinas Pekerjaan Umum ini mengalami perubahan nama, yaitu *Dobuku Jimuso,* bentuk maupun pembagiannya sama seperti jaman *V en W*.

Pada masa setelah proklamasi, keadaan makin memburuk, ada usaha-usaha Pemerintah Belanda yang termasuk dalam pasukan sekutu untuk kembali menjajah Indonesia maka dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya warga *V en W*, terutama para pemudanya turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan itu dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1945 dan kini dijadikan hari bakti Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Listrik pada tahun 1971, di halaman Gedung Sate didirikan monumen yang diberi nama Sapta Taruna, untuk mengenang 7 orang pemuda yang gugur.

Dengan terbentuknya Negara Pasundan, maka seluruh aparatur pemerintah di Jawa Barat menjadi aparatur Negara Pasundan, dan Jawatan Pekerjaan Umum Negara Pasundan dan kantor pusatnya berkedudukan di Bandung tepatnya di Gedung Sate Bandung.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, keluarlah Undang-undang No. 2 tahun 1948 yang menetapkan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia di Yogayakarta mengeluarkan undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ibu kotanya di Bandung. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah maka sebutannya menjadi Jawatan Pekerjaan Umum Swantatra tingkat I Jawa Barat.

Dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-undang Dasar 1945, hal ini membawa akibat keluarnya penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Sk-B/1960 tanggal 13 Juni 1960, tentang Pengaraian. Dengan keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 12 April 1975 sebutan Jawatan Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah tingkat I Jawa

Barat. Dalam pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Barat dikembangkan menjadi 3 (tiga) dinas yaitu;

- Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DT. I Jawa Barat,
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DT. I Jawa Barat,
- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya DT. I Jawa Barat.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1988 tanggal 24 Februari 1988 tentang pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Barat beserta cabang-cabang dinasnya. Selanjutnya Peraturan daerah tersebut disempurnakan dengan peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya (PUCK) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Adapun Rincian tugas Dinas PU Cipta Karya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 74 tahun 1998 Tentang Uraian Tugas Unit di Lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Barat.

Dengan terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dilakukan reoraganisasi Balai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas PU Cipta Karya namanya berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, dan yang sekarang bernama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahan. Yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000, Tentang Dinas

Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 061/01/Org tentang Singkatan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.1301-A/Peg.2008, maka Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) merupakan unsur dinas ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (DISTARKIM) Provinsi Jawa Barat.

1.2 Visi Dan Misi Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

1.2.1 Visi Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Bidang Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 sebagai berikut:

"DENGAN PELAYANAN PRIMA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN MENJADI ANDALAN MENUJU TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN".

Penjelasan :

- **Pelayanan Prima** : Dinas Permukiman mengutamakan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD bidang permukiman dan perumahan.
- **Andalan** : Dinas Permukiman dan Perumahan menjadi OPD utama dan unggulan dalam mewujudkan permukiman dan perumahan yang produktif, harmonis dan berkelanjutan.
- **Produktif** : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya dan pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat menuju kemandirian.
- **Harmonis** : Mendorong harmonisasi antar wilayah dan antar sektor, antar jenjang pemerintahan, antar daerah, dan antar pelaku pembangunan.

- **Berkelanjutan** : Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana yang mengacu pada tata ruang dan budaya lokal.

1.2.2 Misi Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan pembangunan permukiman dan perumahan serta tugas pokok dan fungsi, dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat menetapkan beberapa Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
- Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
- Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan peningkatan uji mutu.
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian.

1.3 Logo Dan Arti Lambang Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Definisi logo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), adalah suatu huruf atau lambang yang mengandung arti tertentu, terdiri dari suatu huruf atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan atau organisasi. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat menggunakan logo sebagai berikut :

Gambar 1.1
Logo



Sumber : Profil Diskimrum Prov. Jabar, 2012

Arti lambang tersebut yaitu :

A. Kujang

Gambar Pokok, sebuah alat serba guna yang sangat dikenal di hampir setiap rumah tangga adat sunda, dan jika diperlukan dapat dipergunakan sebagai alat penjaga diri. Lima lubang melambangkan Lima Dasar Pokok Negara yaitu Pancasila.

B. Padi

Bahan makanan pokok di Jawa Barat serta sekaligus melambangkan pangan. Jumlah padi (17 butir) menyatakan hari ke 17 dari Bulan Proklamasi.

C. Kapas

Melambangkan sandang, jumlah kapas 8 (delapan) buah menyatakan bulan ke 8 dari tahun Proklamasi. PADI dan KAPAS pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.

D. Gunung

Sebagian besar wilayah di daerah Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan.

E. Sungai dan Terusan

Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

F. Sawah dan Perkebunan

Jumlah sawah dan perkebunan yang tidak sedikit, tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat.

G. Dam, Saluran Air dan Bendungan

Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian pokok, mengingat sifat agraris daerah Jawa Barat.

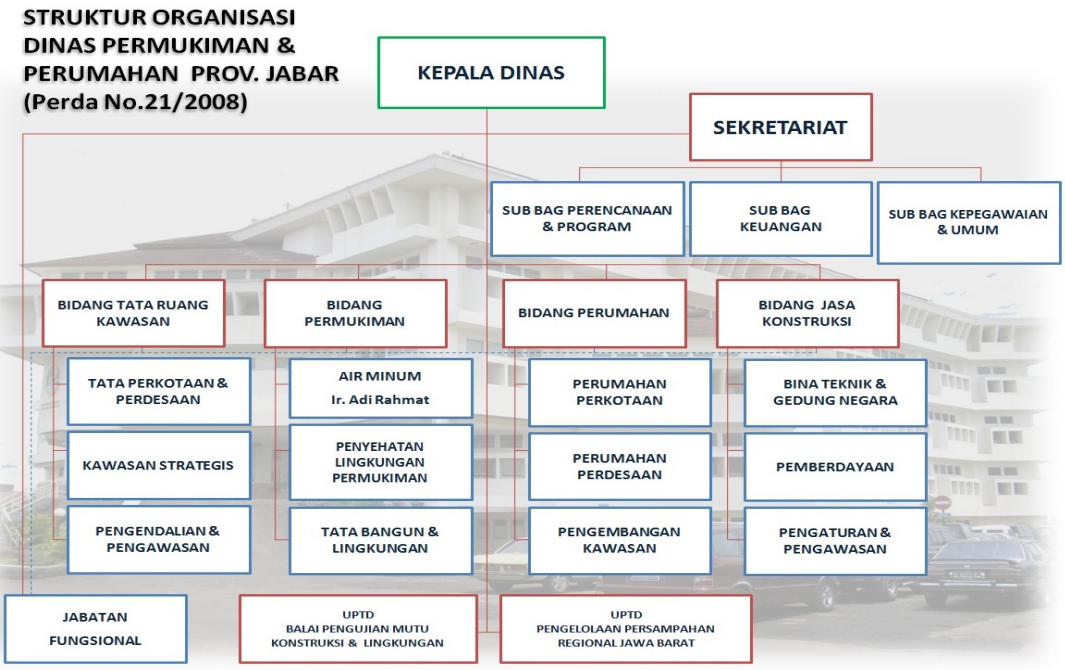
H. Gemah Ripah, Repeh dan Rapih

Sebuah pepatah lama di kalangan masyarakat sunda yang menyatakan bahwa daerah Jawa Barat yang kaya raya dihuni oleh penduduk yang hidup rukun dan damai.

1.4 Struktur Organisasi Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Menurut S.Reksohadiprodjo dan T.H.Handoko (1992:74), menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Struktur Organisasi Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 15 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



Sumber : Humas Dikimrum Prov. Jabar, 2012

Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

A. Kepala

B. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Program;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

C. Bidang Tata Ruang Kawasan, membawahi :

1. Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan;
2. Seksi Kawasan Strategis;
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;

D. Bidang Permukiman, membawahi :

1. Seksi Air Minum;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
3. Seksi Tata Bangun dan Lingkungan;

E. Bidang Perumahan, membawahi :

1. Seksi Perumahan Perkotaan;
2. Seksi Perumahan Perdesaan;
3. Seksi Pengembangan Kawasan;

F. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :

1. Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara;
2. Seksi Pemberdayaan;
3. Seksi Pengaturan dan Pengawasan.

1.5 *Job Description* Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Menurut Rivai (2009:367), deskripsi pekerjaan (*job description*) merupakan kegiatan atau proses dalam menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis suatu perusahaan. Adapun deskripsi tugas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahaan Kota Bandung :

1. **Kepala dinas**

   Mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas dan UPTD.

2. **Sekertariat**

   Mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan koordinasi, perencanaan dan program Dinas, Pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretariat mempunyai bawahan sebagai berikut :

   a. **SubBagian Perencanaan Program**

      Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program.

   b. **SubBagian Keuangan**

      Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

c. SubBagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

3. Bidang Tata Ruang dan Kawasan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan penyelenggaraan pengelolaan tata ruang kawasan meliputi tata perkotaan dan perdesaan, kawasan strategis serta pengendalian dan pengawasan. Bidang Tata Ruang dan Kawasan mempunyai bawahan sebagai berikut :

a. Seksi Tata Perkotaan dan Pedesaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan tata perkotaan dan pedesaan.

b. Seksi Kawasan Strategis

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penataan kawasan strategis.

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalaina dan pengawasan pengelolaan tata ruang kawasan, perukiman dan perumahan.

4. Bidang Permukiman

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan permukiman yang meliputi air minum,

penyehatan lingkungan permukiman, serta tata bangunan dan lngkungan. Bidang Permukiman mempunyai bawahan sebagai berikut :

a. Seksi Air Minum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan sistem air minum.

b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pengembangan penyehataan lingkungan permukiman.

c. Seksi Tata Bangun dan Lingkungan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan.

5. Bidang Perumahan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, dan pengembangan kawasan. Bidang Perumahan mempunyai bawahan sebagai berikut :

a. Seksi Perumahan Perkotaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan.

b. Seksi Perumahan perdesaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan

c. Seksi Pengembangan Kawasan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan gedung negara, yang meliputi teknik dan gedung negara, yang meliputi teknik dan gedung negara, pemberdayaan, pengaturan dan pengawasan. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai bawahan sebagai berikut :

a. Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dalam pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah.

b. Seksi Pemberdayaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan terhadap penyedia jasa, pengguna maupn masyarakat.

c. Seksi Pengaturan dan Pengawasan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi dan gedung negara.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dap di Bentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten atau Kota.

8. Kelompok Jafung (Jabatan Fungsional)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.6 Sarana Dan Prasarana Humas Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Humas Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar sarana dan prasarana Humas Diskimrum Prov. Jabar

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kamera Digital / Photo	3
2	Kamera Video / Handycam	3
3	Televisi	1
4	AC	1
5	Laptop	1
6	Printer	3
7	Dispenser	1
8	Kipas Angin	1
9	Jam Dinding	1

10	Komputer	2
11	Pesawat Telepon	1
12	Meja	18
13	Lemari	6
14	White Board	3
15	Filing Kabinet	3
16	Mesin Tik	1
17	Tempat Sampah	2
18	Cermin	1

Sumber : Humas Diskimrum Prov. Jabar, 2012

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di bagian Humas Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Kota Bandung.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, dimulai pada tanggal 18 Juli 2012 s.d 17 Agustus 2012, setiap hari senin s.d Jumat yang di mulai pada pukul 09.00 WIB s.d 14.00 WIB.